

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Berkinerja, Kompeten,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



# RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang  
2020 - 2024

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI



## KATA PENGANTAR

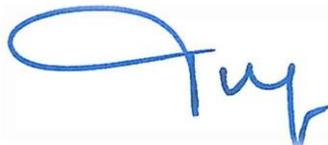
Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekekarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit seluruh pegawai di Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tanjungpinang, Januari 2022  
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan  
Kelas II Tanjungpinang



**Agus Jamludin, SKM, M.Kes**  
NIP. 196908221993031005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Lampiran .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum .....	3
1.3 Potensi dan Permasalahan .....	16
<b>BAB II    VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	
2.1 Visi dan Misi.....	28
2.2 Tujuan .....	28
2.3 Sasaran Strategis .....	29
<b>BAB III    ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI</b>	
3.1 Arah Kebijakan .....	30
3.2 Strategi .....	36
3.3 Kerangka Regulasi .....	36
<b>BAB IV    TARGET KINERJA DAN KEGIATAN</b>	
4.1 Target Kinerja .....	38
4.2 Kegiatan .....	39
4.3 Kerangka Pendanaan .....	47
<b>BAB VII    PENUTUP</b> .....	47
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Pegawai KKP Kelas II Tanjungpinang Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	16
Tabel 2. Sarana dan Prasarana KKP Kelas II Tanjungpinang .....	17

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi KKP Kelas II Tanjungpinang.....	4
Gambar 2.	Peta Wilker KKP Kelas II Tanjungpinang .....	6
Gambar 3.	Peta Wilker Tanjung Uban .....	9
Gambar 4.	Peta Wilker Kijang .....	10
Gambar 5.	Peta Wilker Lobam .....	12
Gambar 6.	Peta Wilker Tarempa .....	14

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks RAK KKP Kelas II Tanjungpinang

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kondisi Umum**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tercapainya hasil yang diharapkan tidak terlepas dari kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

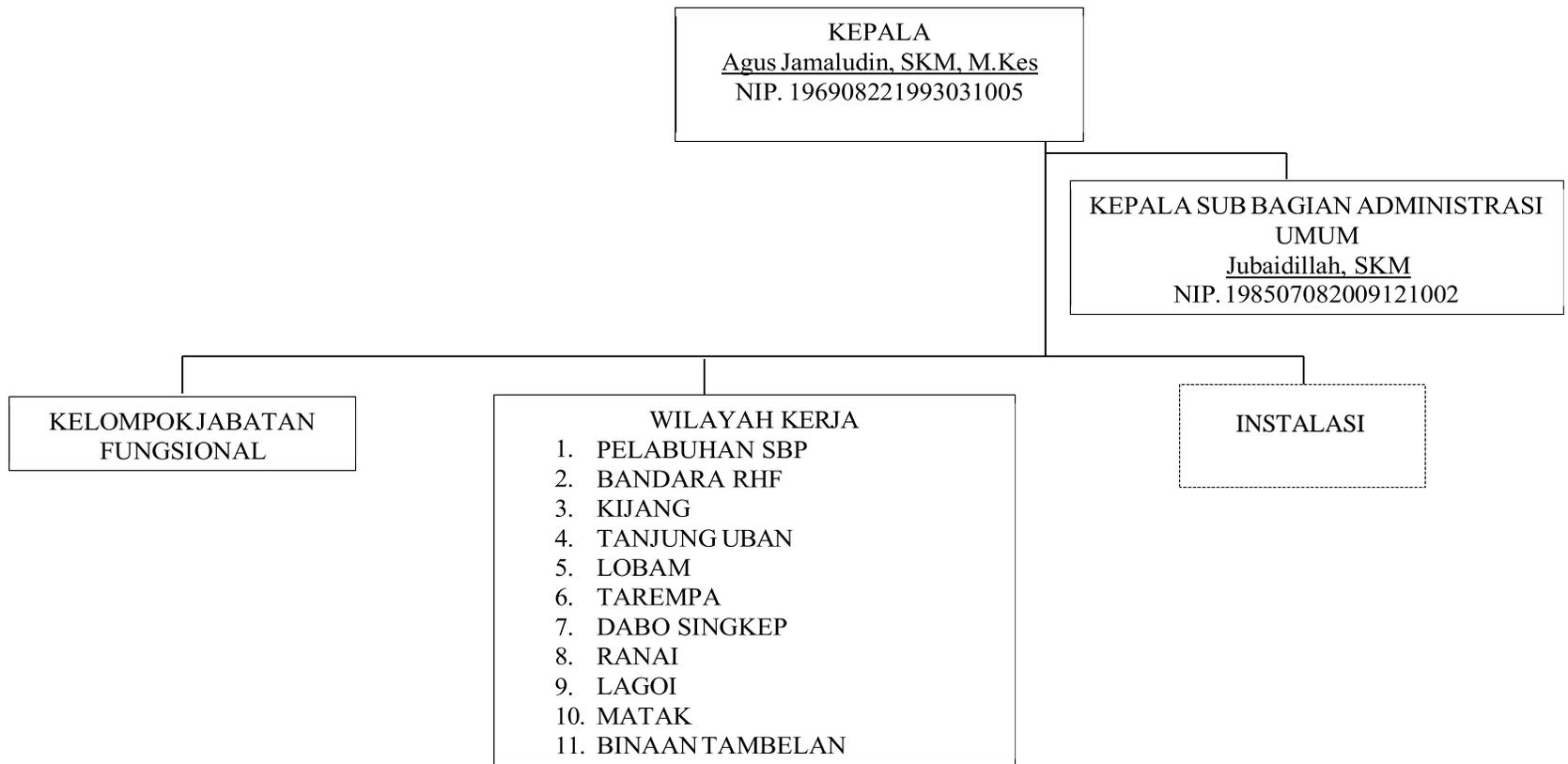
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam hal ini KKP Kelas II Tanjungpinang sebagai UPT Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan Tupoksi yang di amanahkan bertanggungjawab dalam upaya pengendalian masuk / keluarnya penyakit karantina dan penyakit potensial wabah melalui pelabuhan / bandara. Dan berdasarkan dari sasaran pokok RPJMN 2020 - 2024 fokus KKP adalah pada poin 2 dan poin 3 yaitu, meningkatnya pengendalian penyakit dan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Secara detail KKP Kelas II Tanjungpinang dalam Rencana Aksi Kegiatan menitik beratkan pada masalah pokok yaitu :

1. Terselenggaranya Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara
2. Terwujudnya Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara
3. Meningkatnya Tata Kelola Manajemen KKP

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 KKP Kelas II Tanjungpinang diharapkan dapat mensukseskan upaya kesehatan yang berkesinambungan dalam hal pelaksanaan upaya pengendalian seluruh kondisi potensial untuk cegah tangkal penyakit di pelabuhan/bandara Tanjungpinang. Penyusunan RAK ini juga menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan/anggaran KKP Kelas II Tanjungpinang agar terarah dan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan (KKP), merupakan Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Berikut dilampirkan struktur Organisasi KKP Kelas II Tanjungpinang :

**GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG**  
 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi  
 Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan



#### 4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan SDM merupakan faktor kekuatan bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang. SDM yang diperlukan tidak hanya yang memiliki kemampuan managerial yang baik, namun penting juga didukung oleh sumber daya teknis yang handal di dalam penyusunan program maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Distribusi pegawai KKP Kelas II Tanjungpinang sampai dengan bulan Januari tahun 2023 sebanyak 52 Orang ditambah dengan tenaga staf PPNPN sebanyak 23 Orang (baik sebagai sopir, satpam maupun tenaga pramubakti tenaga teknis). Adapun rincian sumber daya manusia di KKP Kelas II Tanjungpinang, sebagai berikut:

- 1) Menurut jabatan:
  - Jabatan struktural: 2 Orang
  - Jabatan fungsional tertentu: 40 Orang
  - Jabatan fungsional umum: 12 Orang
- 2) Menurut golongan:
  - Golongan II : 8 Orang
  - Golongan III : 42 Orang
  - Golongan IV : 4 Orang
- 3) Menurut pendidikan:
  - SLTA: 1 Orang
  - D3: 12 Orang
  - S1: 33 Orang
  - S2: 8 Orang
- 4) Menurut jenis kelamin:
  - Laki-laki: 31 Orang
  - Perempuan: 23 Orang

#### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan maka KKP Kelas II

Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab 1 Pasal 2, KKP menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan.
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan.
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan.
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

Kelompok Koordinator Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas

darat Negara.

Kelompok Koordinator Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Kelompok Koordinator Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Secara umum wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang berada di jalur pelayaran Internasional yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapore serta berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan seperti lampiran gambar berikut.

**Gambar 2. Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang**



Per Tahun 2022 Terdapat 10 Wilayah kerja KKP Kelas II Tanjungpinang terletak di 5 Kota dan Kabupaten sebagai berikut:

1. Kantor Induk dan Pos Pelabuhan Sri Bintan Pura terletak di Kota Tanjungpinang.

Seluruh aktivitas administrasi perkantoran, pelayanan kesehatan dan vaksinasi internasional dipindahkan ke gedung Kantor Induk yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 6 Tanjungpinang. Sedangkan pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kapal, pengawasan alat angkut, dan pengendalian risiko lingkungan tetap dilaksanakan di Pos Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang sendiri terdiri dari dua dermaga yakni Dermaga Domestik dan Dermaga Internasional, dengan 2 daerah *buffer* Pelabuhan yaitu Pelabuhan bongkar muat barang Sri Payung batu VI dan Pelabuhan ASDP Dompok merupakan pelabuhan kapal Roro dengan tujuan penyeberangan ke Tanjung Balai Karimun dan Dabo Singkep. Pelabuhan Sri Bintan Pura

menghubungkan kota Tanjung Pinang dengan pelabuhan-pelabuhan di sebelah utara (pelabuhan Lobam dan pelabuhan Bulang Linggi), dengan kepulauan di sebelah barat, seperti pelabuhan Tanjung Balai (pulau Karimun), pelabuhan Telaga Punggur di pulau Batam, serta kepulauan di sebelah selatan seperti pulau Lingga dan Singkep. Untuk pelayaran ke luar negeri, pelabuhan Sri Bintan Pura juga mempunyai jalur perhubungan ke Singapura (*Harbour Front* dan Tanah Merah) serta Malaysia (Situlang Laut).

## 2. Bandara Raja Haji Fisabilillah terletak di Kota Tanjungpinang

Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) merupakan salah satu wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang yang terletak  $\pm 11$  km dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Bandara RHF saat ini melayani maskapai *Garuda Indonesia Airways*, *Citilink*, *Batik Air* dan *Lion Air* dengan rute penerbangan Tanjungpinang-Jakarta-Tanjungpinang. Pada awal tahun 2017, Bandara RHF juga melayani rute internasional Tanjungpinang-China dari maskapai Citilink. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Bandara RHF meliputi :

- a. Pelayanan poliklinik
- b. Penerbitan surat keterangan laik terbang
- c. Penerbitan surat izin angkut jenazah
- d. Pengawasan TTU/TPM
- e. Pengamatan sanitasi lingkungan
- f. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- g. Pengawasan alat angkut dan penumpang
- h. Memverifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau eHAC (*electronic health alert card*)
- i. Pengecekan suhu tubuh penumpang dan kru pesawat terbang
- j. Validasi surat keterangan hasil RT-PCR, *rapid test* antigen atau *rapid test* antibodi, serta sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi

## 3. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Uban (Kabupaten Bintan)

Wilayah kerja Pelabuhan Laut Tanjung Uban terletak di Bintan Utara, Kabupaten Bintan dengan jarak tempuh sekitar 90 km (waktu tempuh  $\pm 2$

jam) dari Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang. Kantor wilker Tanjung Uban sementara masih difasilitasi oleh PT. Pertamina Tanjung Uban. Wilker Tanjung Uban merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuknya penumpang dari Batam menuju Pulau Bintan menggunakan *speedboat* dan angkutan kapal ASDP. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Tanjung Uban meliputi :

- a. Penerbitan SSCEC/SSCC
- b. Penerbitan PHQC
- c. Penerbitan COP
- d. Pengawasan pelaksanaan hapus serangga dan vektor
- e. Pengawasan TTU/TPM
- f. Pengamatan sanitasi lingkungan
- g. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- h. Pengawasan alat angkut dan penumpang
- i. Memverifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau eHAC (*electronic health alert card*)
- j. Pengecekan suhu tubuh penumpang dan abk kapal laut
- k. Validasi surat keterangan hasil RT-PCR, *rapid test* antigen atau *rapid test* antibodi, serta sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi

Berikut peta wilayah kerja pelabuhan Tanjung Uban



**Gambar 3. Peta Wilayah Kerja Tanjung Uban**

4. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Samudera Kijang (Kabupaten Bintan)  
Wilayah kerja Pelabuhan Laut Samudera Kijang terletak di Bintan Timur, Kabupaten Bintan dengan jarak tempuh sekitar 30 km (waku

tempuh ± 1 jam) dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Kantor Wilayah Kerja Kijang sementara masih difasilitasi oleh PT. Pelindo II Kawasan Sei Kolak Kijang. Wilker Kijang merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuknya penumpang dari Jakarta hingga wilayah timur Indonesia karena terdapat PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Pada tahun 2022 buffer wilker Kijang meliputi Pos Pelabuhan Pulau Tambelan terletak di Laut Cina Selatan dengan jarak tempuh dari pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang ke Pulau Tambelan sekitar 185 mil laut (± 15 jam menggunakan kapal *ferry*). Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilayah kerja Kijang meliputi:

- a. Penerbitan SSCEC/SSCC
- b. Penerbitan PHQC
- c. Penerbitan COP
- d. Pengawasan pelaksanaan hapus serangga dan vektor
- e. Pengawasan TTU/TPM
- f. Pengamatan sanitasi lingkungan
- g. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- h. Pelayanan vaksinasi internasional
- i. Pengawasan alat angkut dan penumpang
- j. Pendampingan pelayanan kesehatan haji
- k. Pelayanan kesehatan pada penyelam tradisional
- l. Pelayanan Posbindu PTM
- m. Memverifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau eHAC (*electronic health alert card*)
- n. Pengecekan suhu tubuh penumpang dan abk kapal laut
- o. Validasi surat keterangan hasil RT-PCR, *rapid test* antigen atau *rapid test* antibodi

Berikut Peta wilayah kerja pelabuhan Kijang



Gambar 4. Peta Wilayah Kerja Pelabuhan Kijang

##### 5. Wilayah Kerja Pelabuhan Lagoi (Kabupaten Bintan)

Wilayah kerja Lagoi terletak di Bintan Utara, Kabupaten Bintan dengan jarak tempuh sekitar 60 km (waktu tempuh  $\pm 1.5$  jam) dari kantor induk KKP Kelas II Tanjungpinang. Lagoi merupakan kawasan wisata terpadu yang terdapat di Pulau Bintan dan merupakan PoE Indonesia dan telah di assessment oleh WHO dan Kemenkes. Kawasan wisata Lagoi dikelola oleh dua perusahaan yakni Bandar Bentan Telani (BBT) Lagoi dan Bintan Lagoon. Pada Hari Kesehatan Nasional Tahun 2016, Pelabuhan Bandar Bentan telani Lagoi mendapatkan penghargaan peringkat Pelabuhan Khusus Tingkat Nasional. Wisatawan yang berkunjung ke Lagoi mayoritas berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Korea, Jepang, Singapura dan Malaysia. Kawasan wisata Lagoi melayani rute pelayaran Lagoi-Singapura ( $\pm 40$  menit menggunakan *ferry*) dan Lagoi-Malaysia ( $\pm 60$  menit menggunakan

*ferry*). Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Lagoi meliputi :

- a. Penerbitan SSCEC/SSCC
- b. Penerbitan PHQC
- c. Penerbitan COP
- d. Pengawasan TTU/TPM
- e. Pengamatan sanitasi lingkungan
- f. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- g. Pengawasan alat angkut dan penumpang
- h. Pelayanan poliklinik terbatas
- i. Penyelenggaraan pelabuhan sehat
- j. Memverifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau eHAC (*electronic health alert card*)
- k. Pengecekan suhu tubuh penumpang dan abk kapal laut
- l. Validasi surat keterangan hasil RT-PCR

6. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sri Udana Lobam ( Kabupaten Bintan )

Wilayah kerja Lobam terletak di Bintan Utara, Kabupaten Bintan dengan jarak tempuh sekitar 70 km (waktu tempuh  $\pm 1.5$  jam) dari kantor induk KKP Kelas II Tanjungpinang. Wilayah Kerja Pelabuhan Lobam merupakan kawasan industri khusus yang dikelola oleh PT. Bintan Inti Industrial Estate (PT. BIIE) berada di Pulau Bintan dan merupakan pelabuhan internasional yang melayani rute Lobam-Singapore ( $\pm 60$  menit menggunakan *ferry*). Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Lobam meliputi :

- a. Penerbitan SSCEC/SSCC
- b. Penerbitan PHQC
- c. Penerbitan COP
- d. Pengawasan TTU/TPM
- e. Pengamatan sanitasi lingkungan
- f. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- g. Pengawasan alat angkut dan penumpang
- h. Pelayanan poliklinik terbatas Memverifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau eHAC (*electronic health alert card*)
- i. Pengecekan suhu tubuh penumpang dan abk kapal laut
- j. Validasi surat keterangan hasil RT-PCR

Berikut Peta wilayah kerja pelabuhan Lobam :



**Gambar 5. Peta Wilayah Kerja Pelabuhan Lobam**

#### 7. Wilayah Kerja Pelabuhan Udara Matak ( Kabupaten Anambas )

Wilayah kerja Pelabuhan Udara Matak terletak di Kabupaten Anambas dengan waktu tempuh  $\pm 8$  jam dari Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang menggunakan kapal *ferry* kemudian disambung dengan perjalanan menggunakan *speedboat*  $\pm 1$  jam. Pelabuhan Udara Matak dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan minyak PT. Medco. Rute penerbangan yang terdapat di bandara ini adalah Jakarta-Matak oleh maskapai Trigana Air dan Tanjungpinang-Matak oleh maskapai Susi Air. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Matak adalah pengawasan alat angkut (pesawat).



9. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Dabo Singkep (Kabupaten Lingga)

Wilayah kerja Dabo Singkep terletak di Kabupaten Lingga dengan jarak waku tempuh  $\pm 4$  jam dari kantor induk KKP Kelas II Tanjungpinang. Pelabuhan Dabo Singkep merupakan pelabuhan rakyat untuk mengangkut komoditi pertanian dan perikanan ke pulau sekitar. Sarana gedung wilayah kerja Dabo saat ini masih berstatus sewa. Pelabuhan yang terdapat di pulau Dabo Singkep adalah Pelabuhan Dabo, Pelabuhan Kote, Pelabuhan Jagoh, Sungai Buluh, Bakong, dan Maroktua. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Dabo Singkep meliputi:

- a. Penerbitan SSCEC/SSCC
- b. Penerbitan PHQC
- c. Penerbitan COP
- d. Pengawasan TTU/TPM
- e. Pengamatan sanitasi lingkungan
- f. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- g. Pengawasan alat angkut dan penumpang
- h. Pelayanan poliklinik terbatas
- i. Pelayanan vaksinasi internasional
- j. Pengecekan suhu tubuh penumpang dan abk kapal laut

10. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Ranai ( Kabupaten Natuna )

Wilayah kerja Ranai berada di Pulau Natuna Besar, Kabupaten Natuna dan merupakan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ranai terletak di lokasi strategis Laut Cina Selatan, yang langsung berbatasan dengan berbagai negara meliputi Vietnam, Kamboja dan Malaysia. Sarana gedung wilayah kerja Dabo saat ini masih berstatus sewa. Infrastruktur pelabuhan/bandara yang terdapat Ranai meliputi Pelabuhan Selat Lampa, Pelabuhan Penagih dan Bandar Udara Ranai. Wilker Ranai dapat ditempuh melalui udara dan laut. Perjalanan udara ditempuh selama  $\pm 1.5$  jam dari Batam, sedangkan perjalanan laut ditempuh selama  $\pm 2$  hari menggunakan Kapal Pelni. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Ranai meliputi :

- a. Penerbitan SSCEC/SSCC
- b. Penerbitan PHQC
- c. Penerbitan COP
- d. Pengawasan TTU/TPM
- e. Pengamatan sanitasi lingkungan
- f. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- g. Pelayanan vaksinasi internasional
- h. Pengawasan alat angkut dan penumpang
- i. Pengecekan suhu tubuh penumpang dan abk kapal laut

### **C. Potensi dan Tantangan**

Pada kurun waktu 2015 s/d 2020 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang telah melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan yang akan dilanjutkan dan ditingkatkan pada Rencana Aksi Kegiatan 2020 s/d 2024. Pada Rencana Aksi Kegiatan 2015 s/d 2020 ini terdapat kegiatan – kegiatan yang menjadi prioritas tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Berikut adalah kegiatan yang dimaksud, antara lain :

#### 1. Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar

Kekarantinaan. Permasalahan:

- Jangkauan pelayanan kekarantinaan masih belum optimal karena berbagai kendala dan hambatan, keterjangkauan wilayah, mengingat wilayah kerja yang luas, akses dan jaringan telekomunikasi yang terbatas.
- Terbatasnya jumlah tenaga surveilans terutama di wilayah kerja menyebabkan keterbatasan dalam menyediakan data yang akurat , *update* dan berbasis informasi.
- Sarana pendukung upaya deteksi dini penyakit potensi wabah dan penyakit lainnya yang masih terbatas yang menyebabkan upaya cegah tangkal dipintu masuk kurang optimal.

Potensi :

- Pengembangan aplikasi yang mampu mempermudah pengguna jasa dan petugas sehingga standar kekarantinaan terpenuhi.

Kelemahan :

- SDM yang terbatas menjadikan kemampuan analitis terhadap alat angkut sesuai standar kekarantinaan menjadi kurang optimal.

Peluang :

- Kemajuan teknologi dan tersedianya SDM bidang teknologi informasi dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan.

Tantangan :

- Membangun jejaring surveilans dengan wilayah guna menciptakan sistem surveilans yang terintegrasi baik dalam hal pelaksanaan tugas teknis di tata laksana kegiatan, pelaporan dan diseminasi informasi.

## 2. Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP

Permasalahan:

- Jangkauan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP masih belum optimal karena berbagai kendala dan hambatan, keterjangkauan wilayah, mengingat wilayah kerja yang luas, akses dan jaringan telekomunikasi yang terbatas.
- Terbatasnya jumlah tenaga Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP terutama di wilayah kerja menyebabkan keterbatasan dalam menyediakan data yang akurat , *update* dan berbasis informasi.
- Sarana pendukung upaya deteksi dini penyakit potensi wabah dan penyakit lainnya yang masih terbatas yang menyebabkan upaya cegah tangkal dipintu masuk kurang optimal.

Potensi :

- Pengembangan aplikasi yang mampu mempermudah pengguna jasa dan petugas sehingga Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP terpenuhi.

Kelemahan :

- SDM yang terbatas menjadikan kemampuan analitis terhadap Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah

Layanan KKP menjadi kurang optimal.

Peluang :

- Kemajuan teknologi dan tersedianya SDM bidang teknologi informasi dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP.

Tantangan :

Membangun jejaring surveilans dengan wilayah guna menciptakan sistem surveilans yang terintegrasi baik dalam hal pelaksanaan tugas teknis di tata laksana kegiatan, pelaporan dan diseminasi informasi.

3. Jumlah Deteksi Dini Dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit Permasalahan:

- Jangkauan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP masih belum optimal karena berbagai kendala dan hambatan, keterjangkauan wilayah, mengingat wilayah kerja yang luas, akses dan jaringan telekomunikasi yang terbatas.
- Terbatasnya jumlah tenaga Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP terutama di wilayah kerja menyebabkan keterbatasan dalam menyediakan data yang akurat , *update* dan berbasis informasi.
- Sarana pendukung upaya deteksi dini penyakit potensi wabah dan penyakit lainnya yang masih terbatas yang menyebabkan upaya cegah tangkal dipintu masuk kurang optimal.

Potensi :

- Pengembangan aplikasi yang mampu mempermudah pengguna jasa dan petugas sehingga Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP terpenuhi.

Kelemahan :

- SDM yang terbatas menjadikan kemampuan analitis terhadap Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP menjadi kurang optimal.

Peluang :

- Kemajuan teknologi dan tersedianya SDM bidang teknologi informasi dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP.

Tantangan :

Membangun jejaring surveilans dengan wilayah guna menciptakan sistem surveilans yang terintegrasi baik dalam hal pelaksanaan tugas teknis di tata laksana kegiatan, pelaporan dan diseminasi informasi.

#### 4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada

Situasi Khusus Permasalahan:

- Jangkauan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP masih belum optimal karena berbagai kendala dan hambatan, keterjangkauan wilayah, mengingat wilayah kerja yang luas, akses dan jaringan telekomunikasi yang terbatas.
- Terbatasnya jumlah tenaga Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP terutama di wilayah kerja menyebabkan keterbatasan dalam menyediakan data yang akurat , *update* dan berbasis informasi.
- Sarana pendukung upaya deteksi dini penyakit potensi wabah dan penyakit lainnya yang masih terbatas yang menyebabkan upaya cegah tangkal dipintu masuk kurang optimal.

Potensi :

- Pengembangan aplikasi yang mampu mempermudah pengguna jasa dan petugas sehingga Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP terpenuhi.

Kelemahan :

- SDM yang terbatas menjadikan kemampuan analitis terhadap Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP menjadi kurang optimal.

Peluang :

- Kemajuan teknologi dan tersdianya SDM bidang teknologi informasi dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP.

Tantangan :

Membangun jejaring surveilans dengan wilayah guna menciptakan sistem surveilans yang terintegrasi baik dalam hal pelaksanaan tugas teknis di tata laksana kegiatan, pelaporan dan diseminasi informasi.

5. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBD Yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Berpotensi Wabah Permasalahan:

- Jangkauan Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBD Yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Berpotensi Wabah masih belum optimal karena berbagai kendala dan hambatan, keterjangkauan wilayah, mengingat wilayah kerja yang luas, akses dan jaringan telekomunikasi yang terbatas.
- Terbatasnya jumlah tenaga Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBD Yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Berpotensi Wabah terutama di wilayah kerja menyebabkan keterbatasan dalam menyediakan data yang akurat , *update* dan berbasis informasi.
- Sarana pendukung upaya deteksi dini penyakit potensi wabah dan

penyakit lainnya yang masih terbatas yang menyebabkan upaya cegah tangkal dipintu masuk kurang optimal.

Potensi :

- Pengembangan aplikasi yang mampu mempermudah pengguna jasa dan petugas sehingga Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP terpenuhi. Kelemahan :
- SDM yang terbatas menjadikan kemampuan analitis terhadap Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP menjadi kurang optimal.

Peluang :

- Kemajuan teknologi dan tersdianya SDM bidang teknologi informasi dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP.

Tantangan :

- Membangun jejaring surveilans dengan wilayah guna menciptakan sistem surveilans yang terintegrasi baik dalam hal pelaksanaan tugas teknis di tata laksana kegiatan, pelaporan dan diseminasi informasi.

#### 6. Jumlah Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah Yang Diterbitkan

Permasalahan:

- Jangkauan Jumlah Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah Yang Diterbitkan masih belum optimal karena berbagai kendala dan hambatan, keterjangkauan wilayah, mengingat wilayah kerja yang luas, akses dan jaringan telekomunikasi yang terbatas.
- Terbatasnya jumlah tenaga Jumlah Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah Yang Diterbitkan terutama di wilayah kerja menyebabkan keterbatasan dalam menyediakan data yang akurat , *update* dan berbasis informasi.
- Sarana pendukung upaya deteksi dini penyakit potensi wabah dan penyakit lainnya yang masih terbatas yang menyebabkan upaya cegah tangkal dipintu masuk kurang optimal.

Potensi :

- Pengembangan aplikasi yang mampu mempermudah pengguna jasa dan petugas sehingga Jumlah Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah Yang Diterbitkan terpenuhi.

Kelemahan :

- SDM yang terbatas menjadikan kemampuan analitis terhadap Jumlah Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah Yang Diterbitkan menjadi kurang optimal.

Peluang :

- Kemajuan teknologi dan tersdianya SDM bidang teknologi informasi dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah Yang Diterbitkan di Wilayah Layanan KKP.

Tantangan :

Membangun jejaring surveilans dengan wilayah guna menciptakan sistem surveilans yang terintegrasi baik dalam hal pelaksanaan tugas teknis di tata laksana kegiatan, pelaporan dan diseminasi informasi.

#### 7. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBD Yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi Permasalahan:

- Kekurangan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sanitasi TTU dan TPP serta pengawasan air bersih secara berkala
- Sarana dan prasarana wilayah kerja yang belum tersedia (wilker Tambelan)

Potensi:

- Terjadinya pengurangan jumlah anggaran dari tahun sebelumnya.

Kelemahan:

- Tindakan penyehatan terhadap TTU, TPP yang telah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan hanya terbatas pada pemberian rekomendasi atau saran perbaikan.

Peluang:

- Melengkapi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Kepmenkes 1314 tahun 2010 tentang Standarisasi KKP.
- Melengkapi pedoman tata laksana kegiatan berupa SOP dan standar layanan seluruh kegiatan yang ada
- Penyesuaian kegiatan yang tercantum di IKK dengan Monev Klasifikasi KKP.

Tantangan:

- Sebaiknya ada komitmen tertulis antara pengelola pelabuhan, stakeholder dan masyarakat pelabuhan dalam rangka mewujudkan pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat kesehatan.

#### 8. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area

Permasalahan:

- Kekurangan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan Vektor dan BPP secara berkala di wilayah pelabuhan/bandara.
- Sarana dan prasarana wilayah kerja yang belum tersedia (wilker Tambelan).

Potensi:

- Bentuk kegiatan vektor dan BPP yang tertuang di RKAKL berupa SBK memiliki kelebihan berupa kemudahan dalam memonitoring tercapai atau tidaknya indikator kinerja sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan.
- Terjadinya pengurangan jumlah anggaran dari tahun sebelumnya.

Kelemahan:

- Bentuk kegiatan vektor dan BPP yang tertuang di RKAKL berupa SBK memiliki kelemahan berupa keterbatasan perencanaan kegiatan yang bersifat inovatif, dan pencairan anggaran yang tidak

dapat digeneralisasi dikarenakan letak geografis wilayah kerja yang berbeda-beda.

Peluang:

- Melengkapi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Kepmenkes 1314 tahun 2010 tentang Standarisasi KKP
- Penyesuaian kegiatan yang tercantum di IKK dengan Monev Klasifikasi KKP.
- Melengkapi pedoman tata laksana kegiatan berupa SOP dan standar layanan seluruh kegiatan yang ada.

Tantangan:

- Kondisi cuaca yang tidak terduga sehingga terjadi pergeseran pelaksanaan kegiatan di wilayah pelabuhan/bandara
- Sebaiknya ada komitmen tertulis antara pengelola pelabuhan, stakeholder dan masyarakat pelabuhan dalam rangka mewujudkan pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat kesehatan

#### 9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

Permasalahan:

- Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung masih belum optimal karena berbagai kendala dan hambatan, keterjangkauan wilayah, mengingat wilayah kerja yang luas, akses dan jaringan telekomunikasi yang terbatas.
- Terbatasnya jumlah Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung terutama di wilayah kerja menyebabkan keterbatasan dalam menyediakan data yang akurat , *update* dan berbasis informasi.
- Sarana pendukung upaya deteksi dini penyakit potensi wabah dan penyakit lainnya yang masih terbatas yang menyebabkan upaya cegah tangkal dipintu masuk kurang optimal.

Potensi :

- Pengembangan aplikasi yang mampu mempermudah pengguna jasa dan petugas sehingga Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung terpenuhi.

Kelemahan :

- SDM yang terbatas menjadikan kemampuan analitis terhadap Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung menjadi kurang optimal.

Peluang :

- Kemajuan teknologi dan tersdianya SDM bidang teknologi informasi dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung.

Tantangan :

- Membangun jejaring surveilans dengan wilayah guna menciptakan sistem surveilans yang terintegrasi baik dalam hal pelaksanaan tugas teknis di tata laksana kegiatan, pelaporan dan diseminasi informasi.

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

Permasalahan:

- Perubahan kebijakan dari pusat yang menjadikan perubahan bentuk laporan dan perlu memahami sehingga laporan jadi terlambat dan tidak sesuai harapan.

Potensi :

- Pengembangan aplikasi yang mampu dalam membantu pemenuhan dokumen dukungan manajemen dan tugas teknislainnya secara cepat dan akurat.

Kelemahan :

- SDM yang terbatas menjadikan kemampuan analitis terhadap Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya menjadi

kurang optimal.

Peluang :

- Kemajuan teknologi dan tersedianya SDM bidang teknologi informasi dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

Tantangan :

- Kecepatan dan kebijakan yang bersifat cepat menjadi hal yang harus di pertimbangkan dalam pengembangan teknologi informasi dan pemenuhan kebutuhan SDM dalam melaksanakan kegiatan Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

#### 11. Jumlah pengadaan sarana prasarana

Permasalahan:

- Standar pemenuhan sarana dan prasarana di Kantor Kesehatan Pelabuhan masih menjadi kesulitan karena standar di masing- masing masih berbeda.

Potensi :

- Beberapa wilayah kerja karena berada di tingkat kabupaten maka diharapkan standar prasarananya dipenuhi lebih baik lagi agar dapat menunjang pelayanan.

Kelemahan :

- Keterbatasan anggaran dan focus kebijakan menjadi kesulitan dalam pemenuhan sarana dan prasarana.

Peluang :

- Kerjasama dan menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dapat menjadi peluang dalam pemenuhan sarana dan prasarana.

Tantangan :

- Pemenuhan sarana dan prasarana harus dapat menunjang pelayanan yang saat ini lebih mengedepankan inovasi dalam teknologi informasi.

## 12. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

Permasalahan:

- Terbatasnya jumlah pelatihan yang ada sehingga peningkatan kapasitas SDM kurang optimal.

Potensi :

- Memanfaatkan Teknologi informasi dalam mencari program pelatihan di berbagai sistem aplikasi website yang mengadakan pelatihan – pelatihan bidang P2P.

Kelemahan :

- SDM yang terbatas menjadikan sulit untuk meninggalkan tugas pokok.

Peluang :

- Adanya aplikasi terintegrasi dari Pusat berupa SIBULAT (Sistem Kebutuhan Pelatihan) menjadikan kemudahan dalam mengidentifikasi pegawai dalam pengembangan kepelatihan.

Tantangan :

- Kompetensi internal dalam keikutsertaan pelatihan menjadi hal yang harus dipersiapkan dalam mengirim Pegawai dalam pelatihan dan pendidikan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi dan Misi**

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi KKP yakni:

- 1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;**
- 2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;**
- 3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;**
- 4. Peningkatan Sumber Data Manusia.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum

yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

## **B. Tujuan Strategis**

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.

2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang telah menetapkan tujuan strategis yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024.**

### **C. Sasaran Strategis**

Dalam mencapai tujuan strategis ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara.
2. Meningkatnya Persentase Faktor Risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan.
3. Meningkatnya Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara.
4. Meningkatnya Nilai Kinerja Anggaran.
5. Meningkatnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
6. Meningkatnya Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja.
7. Meningkatnya Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.

### **D. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja KKP pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indicator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut:

**Tabel 1. Indikator KKP Tahun 2020-2024**

<b>Indikator Tahun 2020-2024 (semula)</b>	<b>Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)</b>
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Tahun 2022-2024, KKP telah menetapkan 7 indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara

Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. Nilai kinerja anggaran

Indikator nilai kinerja anggaran ini mengacu pada pelaksanaan anggaran yang ditunjukkan dalam nilai SMART pada aplikasi smart Kemenkeu dengan instrument nilai penyerapan anggaran, konsistensi, CRO, Efisiensi anggaran, dan Nilai Efisiensi.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil

penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

## **E. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan Kantor Kesehatan Kelas II Tanjungpinang dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan visi misinya adalah sebagai berikut :

### **1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor resiko.**

Menurut IHR tahun 2005 Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan *Port Health Authority* yang artinya bahwa segala urusan mengenai kesehatan di pelabuhan dan bandara menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan. Sejalan dengan IHR tersebut salah satu fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah menyelenggarakan pengawasan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi. Indikator dalam pelaksanaan program ini adalah layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB, layanan kekarantinaan kesehatan, dan layanan pengendalian penyakit infeksi emerging.

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi alat angkut membuat jarak antar seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global.

Ancaman global yang kita hadapi yaitu timbulnya kembali penyakit menular yang sudah pernah terjadi (*re-emerging disease*), penyakit yang masih merupakan masalah (*emerging disease*), penyakit baru yang muncul (*new emerging disease*) dan kemungkinan bio terorisme. Untuk mengantisipasi masuk dan keluarnya ancaman global tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang maka perlu adanya peningkatan kinerja kekarantinaan dan surveilans epidemiologi. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD).

Guna mengantisipasi ancaman penyakit global dan permasalahan

kesehatan masyarakat yang merupakan masalah darurat yang menjadi perhatian dunia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dituntut mampu menangkal risiko kesehatan yang mungkin masuk melalui alat angkut, orang dan barang termasuk kontainer dari negara lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan.

Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan merupakan salah satu upaya mencegah penyebaran penyakit PHEIC melalui pemutusan mata rantai penularan penyakit bersumber lingkungan. Upaya pengendalian risiko lingkungan bertujuan agar wilayah pelabuhan dan alat angkut tidak menjadi sumber penularan ataupun tempat perindukan bagi kuman/vektor penyakit.

Adapun indikator pelayanan dalam upaya meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang meliputi :

- Layanan pengendalian penyakit malaria berupa survei jentik vektor malaria, survei nyamuk vektor malaria, pengendalian vektor malaria dan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian malaria di wilayah pelabuhan/bandara dan alat angkut.
- Layanan pengendalian penyakit arbovirosis (DBD dan *yellow fever*) berupa survei jentik nyamuk *Aedes sp.*, dan pengendalian DBD dan *yellow fever* di wilayah pelabuhan/bandara dan alat angkut.
- Layanan pengendalian penyakit zoonosis (Pes) berupa survei dan pengendalian tikus dan pinjal di wilayah pelabuhan/bandara dan alat angkut.
- Layanan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit berupa survei dan pengendalian lalat dan kecoa di wilayah pelabuhan/bandara dan alat angkut.

Dalam medis, penyakit menular atau penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteri, atau parasit) bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan). Cara-cara penularan penyakit :

- a. Media langsung dari orang ke orang (permukaan kulit) diantaranya HIV/AIDS, IMS, Kusta.
- b. Media udara penyakit yang dapat ditularkan secara langsung ataupun tidak langsung melalui udara pernafasan disebut juga air borne diseases (TB paru, ISP dan ISPA)

Dalam program penanggulangan penyakit menular langsung, KKP menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan kesehatan terbatas di wilayah pelabuhan dan bandara dengan indikator pelayanan meliputi :

1. Layanan Pencegahan HIV/AIDS
2. Layanan Pencegahan penyakit IMS
3. Layanan Pencegahan penyakit TB
4. Layanan Pencegahan penyakit Kusta
5. Layanan Pencegahan penyakit ISP
6. Layanan Pencegahan penyakit ISPA

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus penyakit dan tidak ditularkan kepada orang lain, termasuk cedera akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Penyakit tidak menular (PTM) pada umumnya bersifat kronis sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk penyembuhannya. PTM memiliki tingkat kefatalan yang tinggi. Hampir bisa dipastikan penderita TPM tidak akan sembuh seperti sebelumnya bahkan cenderung memburuk. Penyebab PTM multifaktor yang selanjutnya disebut faktor risiko PTM sejatinya telah dapat diprediksi, sehingga PTM dapat dicegah.

Penyakit yang termasuk PTM utama di Indonesia yaitu penyakit kardiovaskuler, kanker, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), diabetes mellitus serta cedera akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

KKP dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular memiliki indikator pelayanan seperti :

1. Layanan Posbindu PTM dengan mendatangi langsung objek yang berisiko tinggi terkena PTM di lingkungan pelabuhan/bandara seperti pemeriksaan gula darah, kadar kolesterol dan tingkat tekanan darah.
2. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera dengan melakukan sosialisasi pencegahan penyakit gangguan indera penglihatan dan pendengaran pada penyelam dan nelayan tradisional.

3. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru Kronik dengan melakukan advokasi tentang penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) di lingkungan pelabuhan/bandara.

## **2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi**

Untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang perlu adanya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Dukungan tersebut sangat diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, efisien, dan mempunyai daya ungkit. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dapat berupa dukungan dana, SDM, sarana dan prasarana serta pelatihan. Disamping itu dukungan dapat dari instansi vertikal maupun horizontal.

Adapun indikator kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit di KKP Kelas II Tanjungpinang meliputi :

- 1) Layanan Internal berupa pengadaan kendaraan bermotor, pembangunan dan renovasi gedung, penyusunan rencana program, pelaksanaan pemantauan dan informasi, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum dan perlengkapan, pelayanan rumah tangga, pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, pengadaan bahan dan alat kesehatan.
- 2) Layanan Perkantoran berupa belanja gaji pegawai, operasional dan pemeliharaan kantor, perawatan kendaraan operasional, biaya langganan listrik, telepon dan air, dan honor operasional.
- 3) Persiapan dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) berdasarkan instruksi dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

### **3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia**

Berdasarkan strategi Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdapat 5 (lima) kegiatan pokok yang menjadi prioritas. Kelima kegiatan prioritas tersebut adalah:

- **Penguatan dan Pemanfaatan Sumber daya**  
Program ini berupaya untuk membangun pondasi internal SDM agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Sasaran utama kegiatan ini adalah penguatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dan peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung SDM.
- **Pengembangan Kebijakan dan Pedoman yang Berkualitas**  
Program ini dimaksudkan untuk memberikan referensi utama bagi para stakeholder, terutama para Analis Kebijakan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Melalui kegiatan ini berupaya melakukan penyelesaian berbagai kebijakan dan pedoman pelaksanaan Program P2P.
- **Penguatan Sistem Informasi**  
Upaya optimalisasi pembinaan SDM juga perlu diintegrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) agar proses kerja yang dilakukan Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia dapat berjalan dengan lebih akuntabel, profesional, dan efisien. Ketersediaan sistem informasi yang kredibel akan memudahkan dalam mengelola informasi SDM dan melakukan mapping utilisasi. E- Production for Knowledge Management Program ini diarahkan pada upaya peningkatan transparansi dan kemudahan pelayanan kepada stakeholder sehingga stakeholder lebih mudah memperoleh berbagai informasi terkait Pengembangan SDM baik seleksi dan pengembangan maupun, evaluasi dan pemantauan.
- **Pengembangan Network Penguatan kapasitas dan pengembangan SDM.** Program ini berupaya memperkuat Kepegawaian dan Analis Kebijakan melalui pengembangan jejaring kerja dengan stakeholder seperti Kementerian/Lembaga/Pemda terkait dengan pembinaan SDM, baik terkait secara langsung maupun tidak langsung.

#### 4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

Integrasi program dalam terwujudnya pengendalian faktor resiko di pintu masuk negara ke dalam sistem kesehatan ditentukan juga oleh produktivitas interaksi antar- pemangku kepentingan kunci yang memiliki kekuasaan dan kepentingan Dengan situasi seperti ini, tantangannya ialah meningkatkan sensitivitas pemangku kepentingan kunci yang memiliki posisi strategis dan kekuasaan besar seperti Intansi Lintas sektor yang berada dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan agar memiliki pemahaman dan kapasitas yang memadai dalam menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan strategis mengenai Pengendalian Faktor Resiko di Pintu Masuk Negara. Dengan begitu, maka rasa tanggung jawab (akuntabilitas) dan kepemilikan mereka terhadap Kegiatan terkait Pengendalian Faktor resiko di pintu masuk negara juga terpenuhi. Interaksi aktif dan produktif di antara para pemangku kepentingan kunci dapat menciptakan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*) untuk mengoptimalkan intervensi program pencegahan, PDP, dan MD yang di sebgaiian besar daerah menghadapi problem stigma dan diskriminasi dari aspek sosial, kultural, dan politik.

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa KKP Kelas II Tanjungpinang telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Strategi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
  - Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko;
  - Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko;
  - Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
  - Penguatan sistem surveilans dan informasi masalah kesehatan (PHEIC);
  - Pengembangan SDM surveilans;
  - Peningkatan sarana prasarana cegah tangkal penyakit;
  - Penguatan jejaring kerja lintas program dan sektoral.

2. Strategi Pengendalian Risiko Lingkungan
  - Koordinasi lintas sektor terkait di lingkungan pelabuhan/ bandara;
  - Optimalisasi pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan sebagai upaya cegah tangkal penyakit dipintu masuk negara;
  - Peningkatan kapasitas SDM pelaksana pengendalian resiko lingkungan;
  - Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan program penyehatan lingkungan.
3. Strategi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
  - Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan di lingkungan pelabuhan dan bandara;
  - Meningkatkan koordinasi lintas sektor dibidang pelayanan kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit;
  - Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terbatas;
  - Peningkatan kapasitas mutu SDM dibidang pelayanan kesehatan;
  - Meningkatkan sarana prasarana dibidang pelayanan kesehatan.
4. Strategi Dukungan Manajemen
  - Koordinasi lintas sektor dengan pihak terkait dibidang keuangan dan kekayaan negara;
  - Pengembangan SDM terdidik dan terlatih dalam bidang administrasi, kepegawaian dan keuangan;
  - Optimalisasi realisasi anggaran melalui pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana penarikan;
  - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang kegiatan administrasi dan keuangan.
  - Penguatan akuntabilitas

## BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

### A. Kerangka Logis



## MISI

### Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko

Terkendalnya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024

### Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara

Terciptanya kualitas lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara yang sehat

### Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel

Terciptanya tata kelola kegiatan yang #BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, dan Adaptif)

### Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun



## SASARAN STRATEGIS



- Meningkatkan Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara
- Meningkatkan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara.



- Meningkatkan Persentase Faktor Risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan.



- Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran.
- Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- Meningkatkan Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja



- Meningkatkan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

**Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang**

No.	Indikator	Definisi Operasional	Target	Cara Hitung/Sumber Data	PJ
1	Indeks deteksi factor risiko dipintu masuk negara	Jumlah Penapisan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan di Pintu Masuk Negara	0,90	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	UKLW dan PKSE
				Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	PKSE
				Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	PKSE
				Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	PRL
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	95%	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang	UKLW dan PKSE
				Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan alat angkut	PKSE
				Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada barang dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan barang	PKSE
				Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan lingkungan	PRL
3	Indeks pengendalian di pintu masuk negara	Mengukur status pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara (Entry point)	0,80	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	PKSE
				Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal $\leq 1$	PRL
				Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	PRL
				Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	PRL
				Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	PRL
				Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	PRL
				Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	PRL
				Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	PRL
Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	PRL				

				Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	PRL
4	Nilai Kinerja Anggaran	Indikator nilai kinerja anggaran ini mengacu pada pelaksanaan anggaran yang ditunjukkan dalam nilai SMART pada aplikasi smart Kemenkeu	88	Nilai pada SMART DJA	ADUM
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	93	Deviasi Halaman III DIPA Penyerapan Anggaran Belanja Kontraktual Penyelesaian Tagihan Pengelolaan UP Nilai TUP Dispensasi SPM Nilai Capaian Output	ADUM
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	Unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.	75	Penilaian Self Assesment	SATKER
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun	80%	80% dari total pegawai KKP Kelas II Tanjungpinang dilengkapi dengan data dukung Surat Tugas dan Sertifikat pengembangan Kompeten	SATKER

## B. Rencana Kegiatan

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab- bab sebelumnya, maka target kinerja dan rencana kegiatan kerangka pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas II Tanjungpinang 2020-2024 adalah sebagai berikut.

### 1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

#### 1. Indikator kinerja sasaran strategis

Indikator kinerja sasaran strategis KKP Kelas II Tanjungpinang 2020-2024 dapat diuraikan, sebagai berikut:

#### 4.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK KKP Kelas II Tanjungpinang 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1. Indeks deteksi factor risiko dipintu masuk negara 0,90 2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 95% 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 0,80. 4. Nilai kinerja anggaran sebesar 88 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

			<p>sebesar 93</p> <p>6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 75</p> <p>7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 80%</p>
--	--	--	---

## 2. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan KKP Kelas II Tanjungpinang 2020-2024. Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang adalah meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

### a. Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara:

- 1) Pemeriksaan Alat Angkut Sesuai Standar Karantina
  - Pemeriksaan kesehatan alat angkut (kapal dan pesawat)
  - Pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan
  - Pengawasan dan pemeriksaan jenazah di Pelabuhan/Bandara
  - Melaksanakan tindakan karantina
  - Surveilans epidemiologi faktor risiko penyakit pada TKI-B
  - Surveilans epidemiologi di sarana kesehatan
  - Sosialisasi IHR 2005
  - Surveilans epidemiologi faktor risiko penyakit tidak menular pada ABK Kapal
  - Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan Haji dan Umrah
  - Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan

2) Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPM)

- Melaksanakan pengendalian tikus dan pinjal pada alat angkut dan pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja
- Melaksanakan survey dan pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk *Aedes aegypti* penular DBD pada alat angkut dan pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja
- Melaksanakan survey dan pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk *Anopheles sp.* penular Malaria pada alat angkut dan pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja
- Melaksanakan survey dan pemberantasan lalat dan kecoak pada alat angkut dan pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja
- Melaksanakan inspeksi sanitasi air bersih pada alat angkut dan pelabuhan/bandara di wilayah kerja
- Melaksanakan inspeksi sanitasi lingkungan TTU/TPM di pelabuhan/bandara
- Melaksanakan pengukuran kualitas udara
- Melaksanakan pemeriksaan air minum pada alat angkut dan pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja
- Melaksanakan penyuluhan tentang faktor risiko terjadinya penyakit yang bersumber lingkungan
- Memperkuat jejaring kerja dan kemitraan

3) Pemeriksaan/Penapisan Orang

- Melaksanakan pelayanan Posbindu PTM
- Melaksanakan sosialisasi gangguan indera di bandara/pelabuhan
- Melaksanakan gerakan masyarakat dalam pengendalian tembakau
- Melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah pelabuhan/ bandara
- Melaksanakan pelayanan kesehatan matra
- Melaksanakan pelayanan pendampingan kesehatan haji
- Melaksanakan jejaring/kemitraan lintas proram dan lintas sector
- Melakukan penyuluhan dan *mobile VCT* untuk penemuan kasus baru HIV di wilayah pelabuhan
- Melakukan penyuluhan dan *mobile* pemeriksaan IMS untuk penemuan kasus baru HIV di wilayah pelabuhan
- Melakukan sosialisasi terkait penyakit TB pada masyarakat pelabuhan
- Melakukan sosialisasi penyakit infeksi saluran pencernaan pada penjamah makanan
- Melakukan advokasi dan sosialisasi kesiapsiagaan (PHEIC ISPA/Pneumonia)

b. Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang
- 2) Faktor Risiko yang dikendalikan pada Barang
- 3) Faktor Risiko yang dikendalikan pada Alat Angkut
- 4) Faktor Risiko yang dikendalikan pada Lingkungan (TTU, TPM)

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan Data Surveilans
- 2) Jumlah Sinyal SKD KLB dan Bencana Yang Direspon Kurang Dari 24 Jam
- 3) Penyusunan Rencana Kontigensi
- 4) Indeks Pinjal  $\leq 1$
- 5) HI Perimeter = 0
- 6) Tidak Ditemukan Larva Anopheles
- 7) Kepadatan Kecoa Rendah
- 8) Kepadatan Lalat  $< 2$
- 9) TTU Memenuhi Syarat
- 10) TPM Laik Hygiene
- 11) Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

d. Nilai Kinerja Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan Monitoring Evaluasi Kinerja secara berkala baik itu anggaran dan Keluaran (output).
- 2) Penggunaan Aplikasi MONEV DJA

e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya (halaman III DIPA) dengan melakukan revidi dan mengajukan Revisi Halaman III DIPA
- 2) Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM, termasuk akurasi data supplier, untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.
- 3) Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu (paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani) dengan menggunakan sarana tercepat
- 4) Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus atau potensi pagu minus sesegera mungkin, baik terhadap belanja pegawai maupun selain belanja pegawai sampai pada level Akun.

- 5) Ketepatan waktu dalam revolving UP (minimal 1x dalam 1 bulan) dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP tidak lebih dari 1 bulan).
- 6) Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya) dan melakukan rekonsiliasi sesuai jadwal.
- 7) Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan memastikan nomor rekening penerima/tujuan dalam kondisi benar dan aktif untuk menghindari adanya retur SP2D.
- 8) Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan harus sudah disampaikan ke KPPN Sampit)
- 9) Melakukan revisi DIPA secara selektif, terutama yang bersifat pergeseran anggaran (maksimal 1 kali dalam 1 triwulan)
- 10) Menghindari adanya dispensasi SPM khususnya menjelang dan pada akhir tahun anggaran.
- 11) Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran (realisasi triwulan III minimal 60% dan triwulan IV minimal 90%), tanpa mengabaikan capaian volume output kegiatan.
- 12) Meningkatkan akurasi perencanaan kas/ RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas (nilai SPM 1 Milyar ke atas) ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 13.00 pada hari kerja sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM oleh petugas FO KPPN.

f. Kinerja Implementasi WBK Satker

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Sosialisasi dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan Menuju WBK/WBBM didengar dan dipahami oleh Internal dan Eksternal, sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Membuat banner/spanduk/himbauan/brosur
- b) Melalui Website
- c) Melalui Media Sosial
- d) Media elektronik
- e) Media cetak
- f) Media TV

semua yang dilakukan poin a sampai dengan f harus dilengkapi dengan data dukung antara lain: foto/ dokumentasi, Screenshoot Website, Screenshoot medsos, rekaman, link, serta kliping Koran.

2) Penganangan Zona Integritas

Penganangan merupakan kegiatan yang menunjukkan keseriusan dan kemauan dari Unit Kerja untuk melakukan perubahan pada jajarannya menuju WBK/WBBM, sebagai titik

awal dimulainya pembangunan Zona integritas hingga tercapainya WBK/WBBM, meliputi kegiatan:

- a) Eksternal Melaksanakan penganangan Zona Integritas yang disaksikan oleh Instansi, Kementerian/Lembaga, Forkopimda, tokoh masyarakat, Tokoh agama serta dipublikasikan.

- b) Internal
- (1) Melaksanakan penandatanganan pakta integritas antara kepala satuan kerja dengan jajaran struktural dibawahnya;
  - (2) Penandatanganan fakta integritas antara jajaran struktural dalam satuan kerja dengan petugas pelayanan publik;
  - (3) Komitmen tidak memungut biaya diluar ketentuan;
  - (4) Tidak diskriminasi;
  - (5) Tidak melaksanakan gratifikasi (yang menerima dan memberi mendapatkan saksi);
  - (6) Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
- a) Eksternal:
- (1) Foto, laporan kegiatan, Press release;
  - (2) Untuk keseragaman, format/template pakta integritas disiapkan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal (lampiran I).
- b) Internal.
- Dokumen pakta integritas agar ditandatangani pada awal tahun berjalan (Januari) atau saat perjanjian kinerja dan atau saat pergantian pejabat
- 3) Melakukan Evaluasi berkala terhadap Komponen Pengungkit
- Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu:
- Manajemen Perubahan = 5 %
  - Penataan Tatalaksana = 5 %
  - Penataan Sistem Manajemen SDM = 15 %
  - Penguatan Akuntabilitas Kinerja = 10 %
  - Penguatan Pengawasan = 15 %
  - Penguatan Kualitas Pelayanan Publik = 10 %

4) Penguatan dan Evaluasi Indikator hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

- (1) Terwujudnya Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang Bersih dan Bebas dari KKN (20%), diukur dengan menggunakan ukuran:
  - (a) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
  - (b) Presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (20%), diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

g. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Skill Training (Pelatihan Keahlian)

Dalam setiap tahun anggaran di anggarkan pelatihan keahlian bagi setiap pegawai sesuai dengan bidang dan kebutuhan Kantor.

2) Retraining (Pelatihan Ulang)

Melaksanakan pelatihan ulang refresing kemampuan agar SDM yang bersangkutan dapat update ilmu dan keahlian sesuai bidang.

3) Cross Fungsional Training

Cross functional training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan Pegawai untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan lainnya.

4) Team Training

Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan tim biasanya dilakukan di luar ruangan dengan menerapkan beberapa permainan namun tidak jarang pelatihan tim juga dilakukan di dalam kantor.

5) Language Training

Pelatihan Bahasa menjadi penting karena di masa depan atau bahkan

saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Dengan adanya pelatihan bahasa maka pegawai dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada Pegawai

6) Technology Training

Beberapa instansi atau fungsi pasti menerapkan teknologi. Misalnya saja pelayanan digital, developer, dan juga administrasi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian pegawai.

7) Pelatihan kreativitas

Pelatihan kreativitas atau creativity training yaitu pelatihan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebaskan mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Gagasan tersebut nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik.

### **C. Kerangka Kelembagaan**

Sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 terdapat susunan Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjungpinang diklasifikasikan menjadi kelas II dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
3. Kelompok Substansi Koordinator
  - Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
  - Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
  - Pengendalian Risiko Lingkungan
4. Instalasi
5. Wilayah Kerja sebanyak 10 Wilker
  - Kepala Pos Pelabuhan Sri Bintan Pura
  - Kepala Wilker Bandara Raja Haji Fisabilillah
  - Kepala Wilker Tanjung Uban
  - Kepala Wilker Pelabuhan Kijang
  - Kepala Wilker Lobam
  - Kepala Wilker Lagoi
  - Kepala Wilker Dabo Singkep
  - Kepala Wilker Tarempa
  - Kepala Wilker Matak
  - Kepala Wilker Ranai
6. Kelompok Jabatan Fungsional

### **D. Kerangka Regulasi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Prosedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain:

1. Undang Undang Wabah No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah;
2. Undang Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan ;
3. Undang – Undang Wabah No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Permenkes RI Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
6. Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
7. Permenkes RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
8. Permenkes RI Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
9. Permenkes RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
10. Permenkes RI No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans;
11. Permenkes RI No. 2 tahun 20014 tentang klasifikasi kantor kesehatan pelabuhan;
12. Kepmenkes No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
13. Kepmenkes Nomor 1479/Menkes/SK/ X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu;
14. Kemenkes No. 424/MENKES/SK/IV/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman upaya kesehatan pelabuhan dalam rangka karantina kesehatan;
15. SOP KIPI (Kejadian Ikutan pasca Imunisasi);
16. SOP Layanan terpadu penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional;
17. SOP Jejaring Informasi;

18. SOP Karantina rumah atau wilayah;
19. SOP Pemantauan K3JH;
20. SOP Penemuan Kasus;
21. SOP Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional;
22. SOP Penerbitan Sertifikat Free Pratique;
23. SOP Penerbitan SSCEC/SSCC/OME Sailing Permit;
24. SOP Pemeliharaan Vaksin;
25. SOP Penyimpanan Vaksin;
26. SOP Pengadaan Dan Penerimaan Vaksin;
27. SOP Rujukan dan Tata Laksana;
28. SOP Pendistribusian Vaksin;
29. SOP Pengadaan Dan Penerimaan Vaksin;
30. SOP Vaksinasi International;
31. SOP Pelayanan Surat Keterangan Layak Terbang

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas II Tanjungpinang, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Regulasi tentang Terselenggaranya pengendalian faktor resiko di pintu masuk Negara;
2. Regulasi tentang Terwujudnya Pengendalian Faktor Resiko di Pintu Masuk Negara;
3. Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Kantor Kesehatan Pelabuhan;
4. SOP ijin angkut orang sakit;
5. SOP pengawasan penumpang datang dan berangkat;
6. SOP Regulasi dalam deteksi dini dipintu masuk Negara;
7. SOP pengawasan ABK atau crew pesawat;
8. SOP pengawasan masyarakat pelabuhan/bandara;
9. SOP pengawasan ijin angkut jenzah;
10. SOP pengawasan barang bawaan pada pelaku perjalanan internasional;
11. SOP pengendalian faktor resiko pada orang, barang dan alat angkut.

## E. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), kemudian perhitungan pendanaan juga dirancang pada tahun berjalan dan tahun prakiraan maju hingga 2025.

Tabel di bawah ini merupakan gambaran Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 s/d 2025 pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

RINCIAN KEGIATAN											
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun Berjalan Dan Prakiraan Maju)											
No	Output/Komponen	Tahun 2022			Prakiraan Maju						
		Volume	Satuan	Alokasi (Juta)	Target Volume			Alokasi (Juta)			
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1.	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	0,90	Indeks	2.102.240	0,91	0,92	0,93	2.450.000	2.650.000	2.900.000	
2.	Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan	95%	(%)	935.099	96%	97%	98%	1.200.000	1.400.000	1.600.000	
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan	0,80	Indeks	583.197	0,81	0,82	0,83	750.000	1.000.000	1.250.000	
4.	Nilai Kinerja Anggaran	88		10.704.181	89	90	91	11.000.000	11.250.000	11.500.000	
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93		4.066.923	94	95	96	4.250.000	4.500.000	4.750.000	
6.	Kinerja Implementasi WBK Satker	75		31.138	75	75	75	100.000	200.000	300.000	
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	80%	(%)	610.119	80%	81%	82%	800.000	1.200.000	1.600.000	
				<b>Jumlah : 19.032.897</b>				<b>Jumlah : 20.550.000</b>	<b>22.200.000</b>	<b>23.900.000</b>	

## B. SUMBER PENDANAAN

No	Output/Komponen	Alokasi (Juta)				Lokasi	Substansi Pelaksana
		RM	PNBP	PLHN	Jumlah		
1.	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	405.263	1.696.977	0	2.102.240	Tanjungpinang	UKLW, PKSE, PRL
2.	Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan	29.034	906.065	0	935.099	Tanjungpinang	UKLW, PKSE, PRL
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan	240.207	342.990	0	583.197	Tanjungpinang	UKLW, PKSE, PRL
4.	Nilai Kinerja Anggaran	10.704.181	0	0	10.704.181	Tanjungpinang	ADUM
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	4.066.923	0	0	4.066.923	Tanjungpinang	ADUM
6.	Kinerja Implementasi WBK Satker	31.138	0	0	31.138	Tanjungpinang	UKLW, PKSE, PRL, ADUM
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	610.119	0	0	610.119	Tanjungpinang	UKLW, PKSE, PRL, ADUM

Tanjungpinang, 31 Desember 2021  
Kepala Kantor,



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes  
NIP. 196908221993031005

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM**

#### **1. Pemantauan**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan melalui rapat bulanan monitoring realisasi anggaran dan realisasi kegiatan. Penilaian dilakukan dengan menilai kesesuaian antara rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dan juga rencana pencairan dana (RPD) dengan realisasi pencairan dana. RPK dan RPD sebagai acuan pemantauan disusun diawal tahun untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi baik RPK maupun RPD, maka dilakukan revisi per triwulan.

#### **2. Evaluasi**

Pelaksanaan evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat bulanan. Evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di KKP Kelas II Tanjungpinang baik pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Lingkup evaluasi ini diantaranya berupa memantau capaian realisasi kegiatan dan capaian anggaran setiap bulan. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi baik RPK maupun RPD maka dilakukan percepatan kegiatan untuk mencapai target pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. Evaluasi kegiatan juga dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program khususnya kegiatan pengawasan orang, barang dan alat angkut di pelabuhan dan bandara. Evaluasi ini juga bertujuan untuk sinkronisasi dan kolaborasi kegiatan yang dilakukan bersama instansi lain di pelabuhan dan bandara baik pemerintah maupun swasta.

#### **3. Pengendalian**

Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran di KKP Kelas II Tanjungpinang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dan seluruh kegiatan merupakan Perjanjian Kinerja yang harus dicapai. Guna memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan, pengendali kegiatan melakukan pengorganisasian, manajemen, pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus. Jika ditemukan permasalahan, maka pengendali kegiatan akan melakukan evaluasi, revisi atau reorganisasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Tanjungpinang Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas II Tanjungpinang dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, seksi di KKP Kelas II Tanjungpinang mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua seksi dan subbagian Tata Usaha di KKP Kelas II Tanjungpinang Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Tanjungpinang upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

## Lampiran 1 Kerangka Logis Program



## MISI

### Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko

Terkendalnya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024

### Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara

Terciptanya kualitas lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara yang sehat

### Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel

Terciptanya tata kelola kegiatan yang #BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, dan Adaptif)

### Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun

## SASARAN STRATEGIS

- **Meningkatnya Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara**
- **Meningkatnya Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara.**

- **Meningkatnya Persentase Faktor Risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan.**

- **Meningkatnya Nilai Kinerja Anggaran.**
- **Meningkatnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.**
- **Meningkatnya Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja**

- **Meningkatnya Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya**

**Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan**

## RINCIAN KEGIATAN

**A. Perhitungan Pendanaan (Tahun Berjalan Dan Prakiraan Maju)**

No	Output/Komponen	Tahun 2022			Prakiraan Maju					
		Volume	Satuan	Alokasi (Juta)	Target Volume			Alokasi (Juta)		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	0,90	Indeks	2.102.240	0,91	0,92	0,93	2.450.000	2.650.000	2.900.000
2.	Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan	95%	(%)	935.099	96%	97%	98%	1.200.000	1.400.000	1.600.000
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan	0,80	Indeks	583.197	0,81	0,82	0,83	750.000	1.000.000	1.250.000
4.	Nilai Kinerja Anggaran	88		10.704.181	89	90	91	11.000.000	11.250.000	11.500.000
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93		4.066.923	94	95	96	4.250.000	4.500.000	4.750.000
6.	Kinerja Implementasi WBK Satker	75		31.138	75	75	75	100.000	200.000	300.000
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	80%	(%)	610.119	80%	81%	82%	800.000	1.200.000	1.600.000
				<b>Jumlah : 19.032.897</b>			<b>Jumlah : 20.550.000    22.200.000    23.900.000</b>			

## B. SUMBER PENDANAAN

No	Output/Komponen	Alokasi (Juta)				Lokasi	Substansi Pelaksana
		RM	PNBP	PLHN	Jumlah		
1.	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	405.263	1.696.977	0	2.102.240	Tanjungpinang	UKLW, PKSE, PRL
2.	Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan	29.034	906.065	0	935.099	Tanjungpinang	UKLW, PKSE, PRL
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan	240.207	342.990	0	583.197	Tanjungpinang	UKLW, PKSE, PRL
4.	Nilai Kinerja Anggaran	10.704.181	0	0	10.704.181	Tanjungpinang	ADUM
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	4.066.923	0	0	4.066.923	Tanjungpinang	ADUM
6.	Kinerja Implementasi WBK Satker	31.138	0	0	31.138	Tanjungpinang	UKLW, PKSE, PRL, ADUM
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	610.119	0	0	610.119	Tanjungpinang	UKLW, PKSE, PRL, ADUM

Tanjungpinang, 31 Desember 2021  
Kepala Kantor,



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes  
NIP. 196908221993031005

Lampiran 3 Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data

No.	Indikator	Definisi Operasional	Target	Cara Hitung/Sumber Data	PJ
1	Indeks deteksi factor risiko dipintu masuk negara	Jumlah Penapisan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan di Pintu Masuk Negara	0,90	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	UKLW dan PKSE
				Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	PKSE
				Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	PKSE
				Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	PRL
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	95%	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang	UKLW dan PKSE
				Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan alat angkut	PKSE
				Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada barang dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan barang	PKSE
				Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan lingkungan	PRL
3	Indeks pengendalian di pintu masuk negara	Mengukur status pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara (Entry point)	0,80	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	PKSE
				Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal $\leq 1$	PRL
				Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	PRL
				Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	PRL
				Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	PRL
				Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	PRL
				Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	PRL
				Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	PRL
Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	PRL				

				Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	PRL
4	Nilai Kinerja Anggaran	Indikator nilai kinerja anggaran ini mengacu pada pelaksanaan anggaran yang ditunjukkan dalam nilai SMART pada aplikasi smart Kemenkeu	88	Nilai pada SMART DJA	ADUM
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	93	Deviasi Halaman III DIPA Penyerapan Anggaran Belanja Kontraktual Penyelesaian Tagihan Pengelolaan UP Nilai TUP Dispensasi SPM Nilai Capaian Output	ADUM
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	Unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.	75	Penilaian Self Assesment	SATKER
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun	80%	80% dari total pegawai KKP Kelas II Tanjungpinang dilengkapi dengan data dukung Surat Tugas dan Sertifikat pengembangan Kompeten	SATKER